



RENCANA KERJA

Badan Keuangan Daerah

Tahun 2018



Balaikota Among Tani Blok B lt.1
Jalan Panglima Sudirman 507
Kota Batu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKP Daerah ini merupakan dokumen perencanaan Tahunan daerah Pemerintah Kota Batu Tahun 2018 sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP Pusat, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang akan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

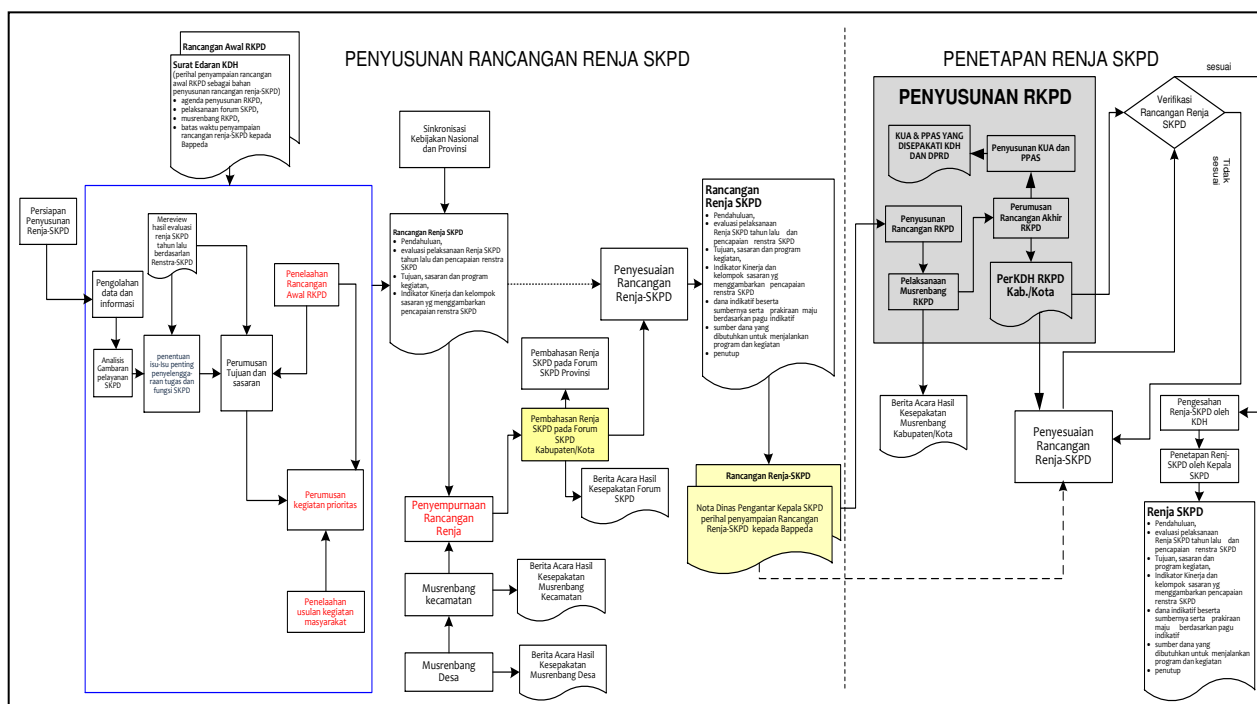
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD



B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah tahun 2018.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai alat ukur untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

C. Landasan Normatif

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

D. Ruang Lingkup Dan Hubungan Renja SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan oleh SKPD yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dengan dokumen manajemen berbasis kinerja. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam setiap dokumen, baik dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan atau evaluasinya.

Sistem Perencanaan merupakan kerangka perencanaan pembangunan meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan
3. Rencana Pembangunan Tahunan.

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan Renstra-SKPD.

Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja-SKPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

E. Sistematika Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Landasan Normatif
- D. Ruang Lingkup Dan Hubungan Renja SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- E. Sistematika Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018

BAB II KONDISI INTERNAL DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU

- A. Kondisi Internal
- B. Lingkungan Strategis
- C. Visi, Misi dan Tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Batu

D. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kota Batu

BAB III RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017-2021

- A. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2017-2021
- B. Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2017-2021

BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Batu
- B. Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2017
- C. Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2017
- D. Kesimpulan Hasil Evaluasi

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018

- A. Prioritas Program
- E. Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018

BAB VI PENUTUP

BAB II

KONDISI INTERNAL DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU

A. Kondisi Internal SKPD Kota Batu

1. Struktur Organisasi

Badan Keuangan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu. Selanjutnya penjabaran tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Badan Keuangan dan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya, dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Badan Keuangan Daerah Kota Batu terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Akuntansi;
- e. Bidang Aset;
- f. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
- g. Bidang Penagihan Pelaporan dan Pengawasan Pajak Daerah
- h. UPT Perkantoran Terpadu
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai

tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah. Bidang Anggaran membawahi:

- a. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pendapatan;
- b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan;
- c. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan Penyusunan Anggaran.

Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta TP-TGR. Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Belanja Langsung;
- b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
- c. Sub Bidang Pengelolaan Kas.

Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selai kas, rekonsiliasi realisasi APBD, sebagai entitas akuntansi dan antitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi

untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Akuntansi membawahi:

- a. Sub Bidang Pelaporan Belanja;
- b. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan;
- c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan dan Sistem Akuntansi.

Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, investasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, serta pengendalian aset. Bidang Aset membawahi:

- a. Subbidang Perencanaan;
- b. Subbidang Pemanfaatan, Penertiban Dan Pengendalian;
- c. Subbidang Penatausahaan & Penghapusan.

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan pajak daerah. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah membawahi :

- a. Sub Bidang Subbidang Pelayanan Dan Informasi;
- b. Sub Bidang Subbidang Pendataan Dan Penilaian;
- c. Sub Bidang Subbidang Penetapan Dan Pengolahan Data;

Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan evaluasi pajak daerah. Bidang Penagihan Pajak Daerah membawahi :

- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Pelaporan Dan Evaluasi;

c. Sub Bidang Pengendalian Dan Pengawasan.

Selain enam bidang dan satu sekretariat, Badan Keuangan Daerah membawahi Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu yang mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan pemeliharaan dan pengendalian operasional Gedung Perkantoran Terpadu. UPT Perkantoran Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang membawahi seorang Kepala Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

2. Gambaran Tugas dan Fungsi

1. Tugas Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Badan Keuangan Daerah Kota Batu merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

2. Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Batu

- a. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Batu terdiri dari:

Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	PNS	120	88,04%
2	CPNS	0	0
3	NON PNS	13	11,96%
JUMLAH		133	100%

Susunan Pegawai Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Golongan:

NO	GOLONGAN	JUMLAH	
		PNS	CPNS
1	GOLONGAN IV	8	0
2	GOLONGAN III	75	0
3	GOLONGAN II	37	0
4	GOLONGAN I	0	0
JUMLAH		120	0

Susunan Pegawai Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	ESELON	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	7
3	ESELON IV	23
JUMLAH		31

B. Lingkungan Strategis

Dalam rangka menyusun suatu formulasi perencanaan strategik yang merupakan perwujudan terhadap sesuatu yang hendak dicapai, maka diperlukan pendalaman dan penguasaan informasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan internal dan eksternal. Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Pencerminan Lingkungan Internal (PLI) dan Pencerminan Lingkungan Eksternal (PLE) disini adalah untuk mencermati kekuatan dan kelemahan Badan Keuangan Daerah meliputi faktor peluang dan tantangan eksternal yang mempengaruhi, sehingga dapat dilakukan antisipasi menghadapi perubahan di masa mendatang yang lebih bersifat inovasi dan perbaikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang di miliki dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Analisa SWOT merupakan awal yang penting dalam menyusun perencanaan. Dasar pijak analisis berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Berdasarkan kajian terhadap data-data kondisi Badan Keuangan Daerah Kota Batu di lapangan dapat diketahui faktor internal yaitu kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*), serta faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Selanjutnya dapat diketahui strategi apa yang harus digunakan.

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)	
1.	Peran BPKAD yang strategis	1.	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
2.	Memiliki kewenangan yang diakui Undang-undang dalam penyelenggaraan organisasi	2.	Belum seluruh bagian menerapkan pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja.
3.	Komitmen pimpinan untuk membawa perubahan BPKAD kearah yang lebih baik	3.	Belum diterapkannya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja aparatur.
4.	Loyalitas dan kreativitas aparatur	4.	Pola pengadaan aset yang belum didasarkan pada kinerja
FAKTOR EKSTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG (O)		TANTANGAN (T)	
1.	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja	1.	Seringnya terjadi Perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelola keuangan dan struktur organisasi
2.	Tuntunan masyarakat untuk pelaksanaan <i>good governance</i> .	2.	Dampak negatif arus globalisasi
3.	Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi lain baik lokal, regional, maupun internasional	3.	Penempatan pejabat belum seluruhnya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi
4.	Memiliki kapasitas mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal	4.	Terjadinya multi interpretasi terhadap Otonomi Daerah dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan

C. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Tujuan dan sasaran merupakan upaya melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif untuk menjembatani visi dan misi kepala daerah menuju program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu. Tanpa adanya tujuan dan sasaran, visi dan misi kepala daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Batu akan sangat sulit dioperasionalkan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran ini merupakan dampak yang diharapkan terwujud sebagai bentuk keberhasilan pembangunan daerah. Yang dimaksud tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah:

1. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah

Sasaran strategis yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Keuangan dan aset Daerah;
2. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak

D. Permasalahan Dan Tantangan Pembangunan Kota Batu

Permasalahan pembangunan adalah salah satu input yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan. Dengan diketahuinya berbagai permasalahan yang terjadi, maka berbagai kebijakan yang akan ditetapkan akan semakin mengarah kepada upaya pemecahan

masalah yang terjadi. Agar identifikasi terhadap berbagai permasalahan ini lebih dalam dan mendetail, maka permasalahan akan diidentifikasi berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan pada sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2015 dan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah.

Sesuai dengan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 bahwa untuk menganalisis permasalahan pembangunan, Kota Batu telah menetapkan 87 sasaran pokok RPJPD.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Batu yang mengacu pada permasalahan pembangunan yang menyajikan berbagai permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dengan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD dalam penentuan program prioritas Kota Batu.

**Identifikasi permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
Kota Batu**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Belum ada action terhadap permasalahan yang terjadi	Komitmen masyarakat desa	Proses pemenuhan SDM yang memadai	Belum semua desa memiliki SDM yang memadai	Kurang dukungan anggaran untuk sarana prasarana pemerintahan desa dari ADD maupun dari APBD
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Belum terlaksananya IKM di SKPD	Penetapan dan penerapan prosedur, persyaratan, kecepatan dan	Dukungan seluruh pegawai dalam	Partisipasi SKPD dalam mengisi kuesioner penilaian IKM	Belum ditetapkannya SOP dan SPM

		ketepatan waktu, keadilan, serta kenyamanan pelayanan	pelaksanaan survey IKM		
--	--	---	------------------------	--	--

BAB III
RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAERAH

A. Strategi, Kebijakan, Program Dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana terantum dalam RPJMD Kota Batu 2018 – 2022. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan factor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan lingkungan yang ada, untuk lima tahun kedepan Badan Keuangan Daerah menetapkan strategi antara lain:

- 1) Menjalin kerjasama dan kemitraan Masyarakat, Swasta dan Pemerintah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli daerah
- 2) menerapkan, dan memperbaiki sistem pengeloaam keuangan dan aset serta proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme personil Badan Keuangan Daerah sebagai penunjang pelayanan prima

Adapun untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan adanya kebijakan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi. Kebijakan Badan Keuangan Daerah antara lain:

1. Optimalisasi penerimaan daerah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
2. Mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola sistem perekaman data dan informasi yang valid dan terbaru yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

3. Mengembangkan Potensi Kemampuan Personil sesuai bidang dan Tanggung Jawabnya serta penerapan Reward and Punishment terhadap Prestasi Kerja yang terukur

Untuk mempermudah pemahaman serta mengevaluasi keterkaitan dan sinkronisasi terhadap RPJMD Kota Batu Tahun 2018 - 2022, maka Tabel berikut menyajikan *roadmap* Rencana Strategis BKD Kota Batu Tahun 2018 – 2022 yang meringkas rumusan hasil pemikiran dan uraian di atas.

B. Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018

Arah kebijakan Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2018 diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

1. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.

Kebijakan ini diarahkan pada penganggaran berbasis kinerja, dimana anggaran disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta target capaian yang telah disusun pada tahun bersangkutan. Selain itu efektifitas dan efisiensi anggaran diarahkan pada ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan. Sejalan dengan penerapan sasaran kinerja pegawai, dimana masing-masing pegawai harus memiliki sasaran kinerja masing-masing, begitu pula SKPD diharapkan tepat waktu dalam pengelolaan anggaran serta target capaian kinerjanya.

2. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;

Kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran sejalan dengan program pembangunan gedung perkantoran terpadu (block office). Sehingga kebijakan tersebut mulai dilaksanakan tahun 2013 dimana dilaksanakan kegiatan pengadaan meubelair untuk kelengkapan block office. Diharapkan dengan selesainya pembangunan block office tahun 2015, maka kebutuhan sarana dan prasarananya juga dapat terpenuhi.

3. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan perkembangan teknologi informasi (TI);

Kebijakan dalam membenahan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah dimulai tahun 2014 sehubungan dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu mulai tahun 2014 mulai dilakukan sosialisasi, bimtek dan pembinaan sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual dan tahun 2015 sejalan dengan pemberlakuan sistem tersebut tetap akan dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan bagi SKPD.

BAB IV
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Program dan kegiatan pembangunan disusun berdasarkan pada upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Batu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu Tahun 2012 - 2017. Program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah yang direncanakan dalam kurun waktu 5 tahunan dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor BKD. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan untuk menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana bagi pegawai beserta pemeliharaannya. Selain itu program ini merumuskan sasaran pemenuhan sarana dan prasarana gedung perkantoran terpadu meliputi interior, mebel, sebagai program kegiatan lanjutan bagi pemenuhan sarana prasarana gedung perkantoran terpadu. Pemenuhan sarana

prasarana tersebut direncanakan akan tuntas tahun 2017 dan untuk tahun 2018 diproyeksikan untuk rehabilitasi berkala gedung perkantoran terpadu. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, ditujukan untuk pemenuhan operasional dan pemeliharaan gedung perkantoran terpadu. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pada tahun 2017 dilaksanakan untuk seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu dipusatkan di Badan Keuangan Daerah. Kegiatan Pelayanan Operasional Gedung Perkantoran Terpadu untuk memenuhi operasional pelayanan gedung perkantoran terpadu termasuk penyediaan fasilitas dan prasarana kerjanya.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya di Badan Keuangan Daerah. Pengembangan SDM tersebut dikhususkan pada disiplin ilmu tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, namun tidak menutup kemungkinan peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan untuk menunjang kegiatan administratif, misalnya dalam bidang perencanaan, kesekretariatan, hukum dan perundang-undangan bagi intern pegawai Badan Keuangan Daerah. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Pada tahun 2017 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dilaksanakan dalam bentuk pengiriman Diklat PIM IV bagi pejabat struktural Eselon IV sebanyak 5 orang. Untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, pada tahun 2017 dilaksanakan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi seluruh pejabat dan staf Badan Keuangan Daerah yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini disusun dengan rencana output berupa laporan baik laporan capaian kinerja maupun keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD, Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD, Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan,

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelesaian Aset/Barang Daerah, Penyusunan Pedoman Pengelolaan Aset/Barang Daerah, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Penertiban dan Pengamanan Aset/BMD, Perencanaan dan Analisa Kebutuhan BMD, Penunjang Administrasi dan Penatausahaan Keuangan

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota yaitu Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan sistem e-budgeting yang digunakan untuk penyusunan anggaran tahun 2018.

B. Kesimpulan Hasil Evaluasi

Pada tahun 2017, Badan Keuangan Daerah menetapkan program kerja prioritas berdasarkan hasil capaian kinerja dan evaluasi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dan proyeksi tahun 2018. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 adalah dalam rangka :

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran terpadu tuntas dilaksanakan pada tahun 2017 sehingga pada tahun 2018 hanya direncanakan evaluasi dan rehabilitasi berkala gedung dalam bentuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Perkantoran Terpadu;
2. Penyelesaian sengketa aset dan penertiban dan pengamanan aset baik terhadap aset yang bermasalah (mengalami sengketa) maupun aset yang belum terselesaikan secara administratif merupakan kegiatan lanjutan pada tahun 2016 dan tetap dilaksanakan pada tahun 2018.
3. Tugas dan fungsi utama Badan Keuangan Daerah sehubungan dengan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan setiap tahun antara lain Penyusunan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Perda Pertanggungjawaban Keuangan, serta laporan pendukung antara lain Laporan Keuangan, Kegiatan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan serta penatausahaan aset.
4. Pemantapan SDM di bidang pendapatan, keuangan dan aset yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 diharapkan membawa dampak positif bagi peningkatan kompetensi SDM dan akan dievaluasi kembali pada tahun 2018.

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2018

A. Prioritas Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

B. Program Dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan yang direncanakan pada Tahun 2018:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor,
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,
 - i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kantor,
 - f. Pelayanan Operasional Gedung Perkantoran Terpadu
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD,
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD,
 - c. Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan,
 - d. Penyusunan Saldo Awal Berbasis Akrual SKPD dan SKPKD.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD,
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD,
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD,
 - d. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD,
 - e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
 - f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
 - g. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah,
 - h. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - i. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah,
 - j. Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah,
 - k. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
 - l. Penertiban dan Pengamanan Aset

- m. Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Daerah
 - n. Verifikasi Data Pajak Daerah
 - o. Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah
 - p. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
 - q. Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah
 - r. Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB-P2
 - s. Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah
 - t. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan
 - u. Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
 - v. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
 - w. Pemetaan Potensi Pajak Daerah
 - x. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - y. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan
6. Progam Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Faslitasi Pengembangan dan Integrasi Teknologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 ini merupakan aplikasi teknis penjabaran Program kegiatan dengan target capaian yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Draft Awal RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018 merencanakan pelaksanaan Program Kegiatan yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul. Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu meliputi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang. Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam rangka menyempurnakan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Batu, 2017

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAERAH



Drs. ZADIM EFFISIENSI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670404 198602 1 003

Matrik Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018
Kota Batu

Nama OPD : Badan Keuangan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Sasaran outcome)	Rencana Tahun 2018					Catatan Penting	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja (output)	Kebutuhan dana (pagu indikatif)	Sumber Dana			
					APBD Kota	APBD Prov		APBN/Hibah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	Badan Keuangan Daerah	9000 surat	15.344.000	APBD Kota			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan listrik, air, telepon gedung pemerintah	Badan Keuangan Daerah	12 bulan	2.952.000.000	APBD Kota			
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	pembayaran honorarium pegawai honorer dan pengelola keuangan	Badan Keuangan Daerah	12 bulan	1.580.243.800	APBD Kota			
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	penyediaan kebutuhan kebersihan dan pembayaran petugas kebersihan	Balai Kota Among Tani	12 bulan	784.376.400	APBD Kota			
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	Balai Kota Among Tani	12 bulan	123.019.100	APBD Kota			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Badan Keuangan Daerah	12 bulan	92.943.800	APBD Kota			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	pemenuhan kebutuhan alat listrik dan jaringan gedung perkantoran terpadu	Balai Kota Among Tani	12 bulan	1.103.942.050	APBD Kota			
Penyediaan Bahan Baccan dan Peraturan Perundang-Undangan	harganasi surat kabar harian	Badan Keuangan Daerah	3 jenis	14.812.920	APBD Kota			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	pemenuhan kebutuhan logistik kantor	Badan Keuangan Daerah	12 bulan	57.618.300	APBD Kota			
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	kelancaran operasional perjalanan dinas luar daerah	Badan Keuangan Daerah	12 bulan	99.774.000	APBD Kota			
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	kelancaran operasional perjalanan dinas dalam daerah	Badan Keuangan Daerah	12 bulan	10.500.000	APBD Kota			
Program Peningkatan Sarana dan								

Rencana Tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sesaran outcome)	Lokasi	Target Capaian Kinerja (output)	Kebutuhan dana (pagu indikatif)	Sumber Dana		Catatan Penting
					APBD Kota	APBD Provisi	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Perda APBD tepat waktu	Pemerintah Kota Batu	1 Perda APBD 2018	608.806.600	APBD Kota		
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	Perwali Penjabaran APBD tepat waktu	Pemerintah Kota Batu	1 Perwali Penjabaran APBD 2018	239.700.000	APBD Kota		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Perda P-APBD tepat waktu	Pemerintah Kota Batu	1 Perda P-APBD 2017	655.595.000	APBD Kota		
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	Perwali P-APBD tepat waktu	Pemerintah Kota Batu	1 Perwali Penjabaran P-APBD 2017	227.781.020	APBD Kota		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	Pemerintah Kota Batu	1 Perda Pertanggungjawaban TA.2016	151.227.000	APBD Kota		
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perwali Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	Pemerintah Kota Batu	1 Perwali Pertanggungjawaban TA.2016	39.480.000	APBD Kota		
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	terbnt administratif penatausahaan aset dan terbayarnya honorarium operator SIMAKOBA	Pemerintah Kota Batu	12 bulan	1.365.452.500	APBD Kota		
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi perda dna perwali pengelolaan keuangan	Pemerintah Kota Batu	1 Perwali	173.672.000	APBD Kota		
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	Peremajaan SIMAKOBA	Pemerintah Kota Batu	1 sistem	430.218.500	APBD Kota		
Manajemen Pengeluaran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	Sidang TGR	Pemerintah Kota Batu	1 kali	76.940.000	APBD Kota		
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rekan panulian dan operasi sistir	kota Batu	12 bulan	387.245.600,00	APBD Kota		
Perbaikan dan Peryamanan Aset	Penyelesaian kasus senketa aset	Pemerintah Kota Batu	2 kasus	237.865.000	APBD Kota		
Penyusunan dan Analisa Kebutuhan Rencana Daerah	Pembangunan sistem informasi perencanaan kebutuhan barang	Pemerintah Kota Batu	1 sistem	163.407.700	APBD Kota		

Rencana Tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (asasran outcome)	Lokasi	Target Capaian Kinerja (output)	Kebutuhan dana (pagu Indikatif)	Sumber Dana			Catatan Penting
					APBD Kota	APBD Prov	APBN/Hibah	
Perencanaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	Sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak baru	Badan Keuangan Daerah	200 WP	51.609.000,00	APBD Kota			
Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	Silent Operasi dan Pemeriksaan pajak	Badan Keuangan Daerah	12 bulan	85.594.000,00	APBD Kota			
Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah	Pemeliharaan sistem pendapatan pajak	Badan Keuangan Daerah	1 sistem	284.491.000,00	APBD Kota			
Cetak Masal SPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB-P2	Cetak dan distribusi SPT PBB-P2 sebagai Dasar Pengenaan Pajak	Badan Keuangan Daerah	94000 SPT	286.545.000,00	APBD Kota			
Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah	Tersedianya Laporan Pendapatan Daerah Yang Valid	Badan Keuangan Daerah	8 laporan	479.195.000,00	APBD Kota			
Perluasan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Pencetakan SP2D tepat waktu	Badan Keuangan Daerah	10000 SP2D	292.451.500,00	APBD Kota			
Penataan A/sip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	A/sip PKD	Badan Keuangan Daerah	12 bulan	17.417.050,00	APBD Kota			
Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Operasional pelayanan pajak	Kota Batu	12 bulan	145.689.900,00	APBD Kota			

Rencana Tahun 2018									
Ususan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (asasran outcome)	Lokasi	Target Capaian Kinerja (output)	Kebutuhan dana (pagu indikatif)	Sumber Dana			Catatan Penting	
					APBD Kota	APBD Prov	APBN/Hibah		
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi bendahara SKPD	Pemerintah Kota Batu	40 SKPD	151.372.200	APBD Kota				
Penyusunan Dokumen Evaluasi perencanaan	Dokumen evaluasi perencanaan	Badan Keuangan Daerah	2 dokumen	70.800.000	APBD Kota				
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer	Optimisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	Badan Keuangan Daerah	Pengembangan aplikasi belanja barang yang diserahkan ke masyarakat	160.000.000	APBD Kota				
Pengelolaan Keuangan Daerah									
Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Teknologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Badan Keuangan Daerah	2 sistem	219.391.364,69	APBD Kota				
JUMLAH					24.271.092.164,69				

KEDALA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Drs. ZAIDI ETISIENSI, M.Si
NIP. 19670404 198602 1 003